



# **Mengurangi Kemiskinan Melalui Keterbukaan dan Kerjasama Penyediaan Data**

Disampaikan oleh:

**Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas  
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

pada

**Peluncuran “Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015”**

Jakarta, 18 April 2017

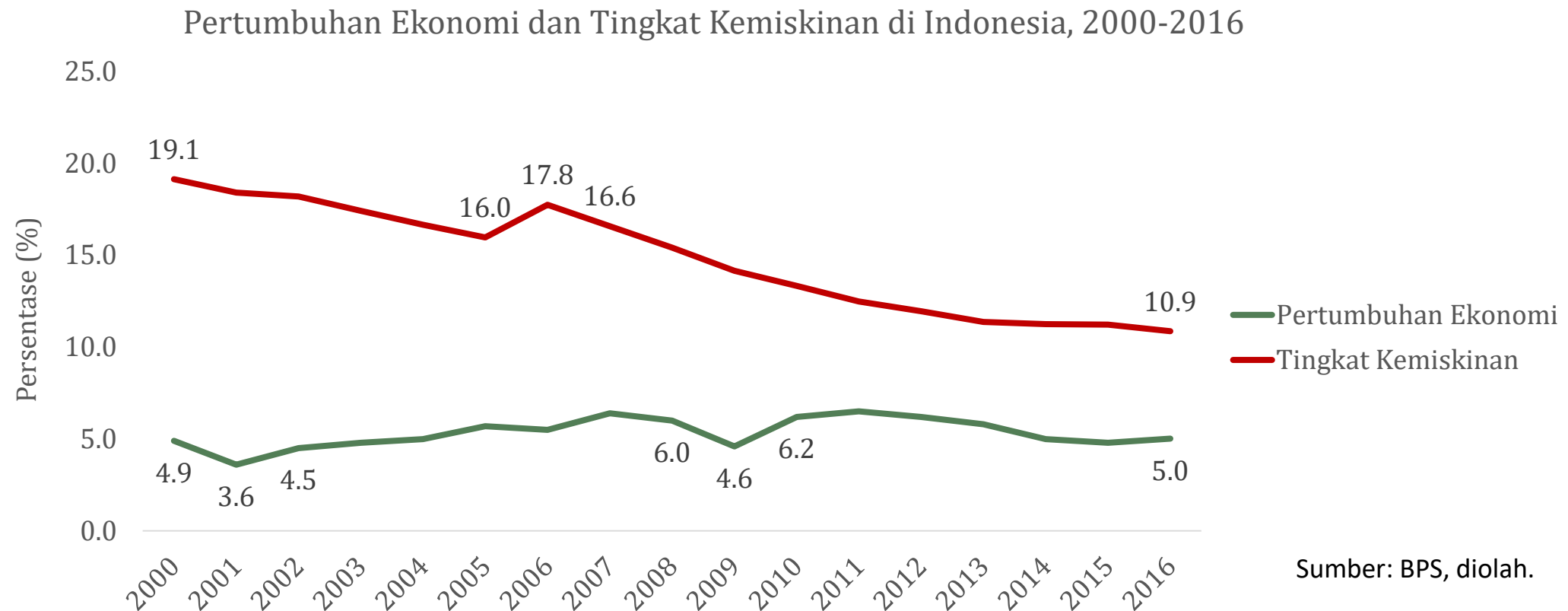
# Arah dan Target Pembangunan – Isu Kemiskinan dalam Agenda Nasional

---

- Tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030.
- Salah satu sasaran utama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.0 – 8.0 persen di tahun 2019.
- Dalam Rapat Paripurna Kabinet Kerja pada tanggal 4 April 2017, Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa pagu indikatif RAPBN 2018 harus difokuskan untuk mencapai target pembangunan, salah satunya, menurunkan angka kemiskinan menjadi *single digit*.

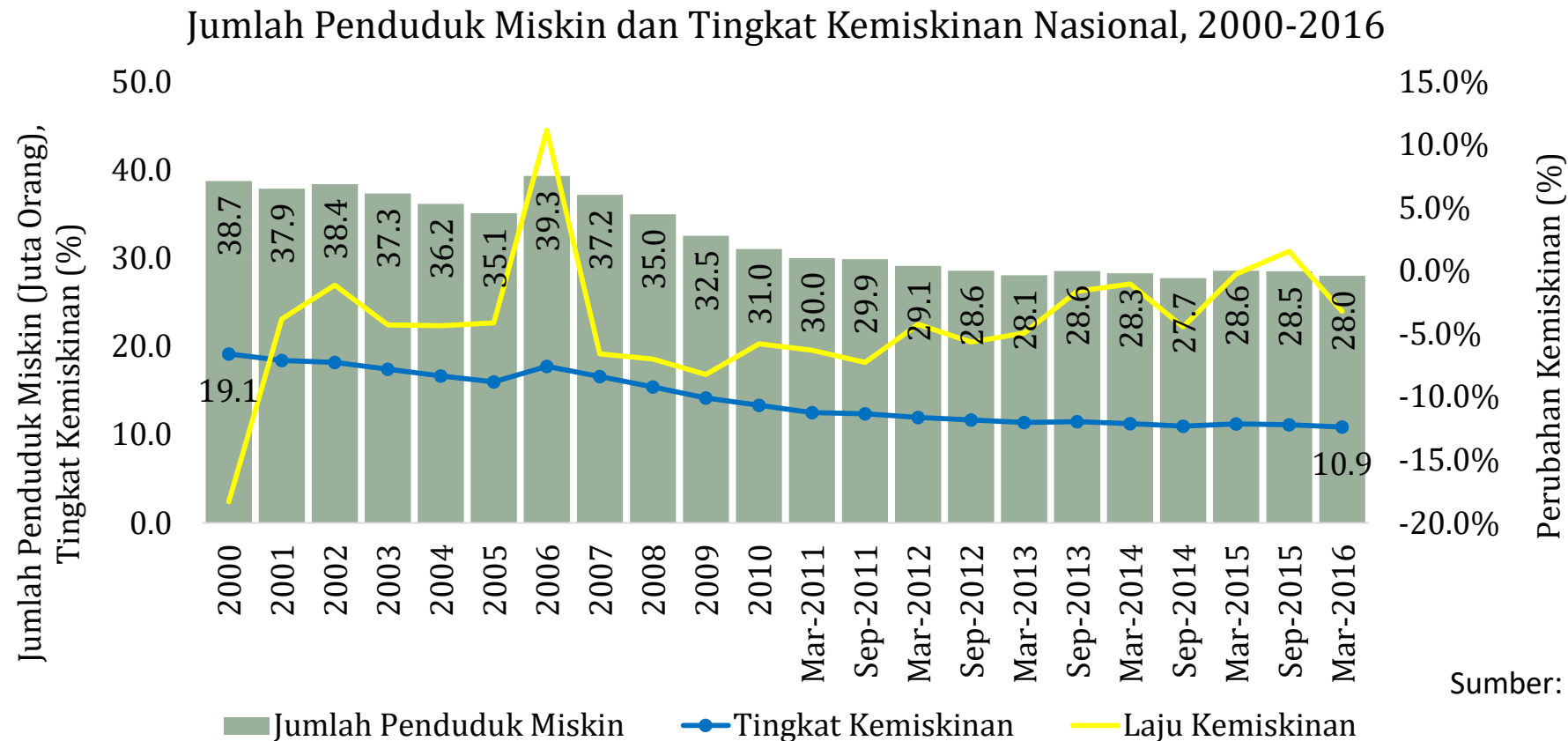
# Urgensi Isu Kemiskinan – Perkembangan Indikator Makro

- Dalam 16 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi stagnan dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 19.1 persen menjadi 10.9 persen.



# Perkembangan Indikator Kemiskinan

- Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun laju penurunan kemiskinan mengalami perlambatan sejak tahun 2007.

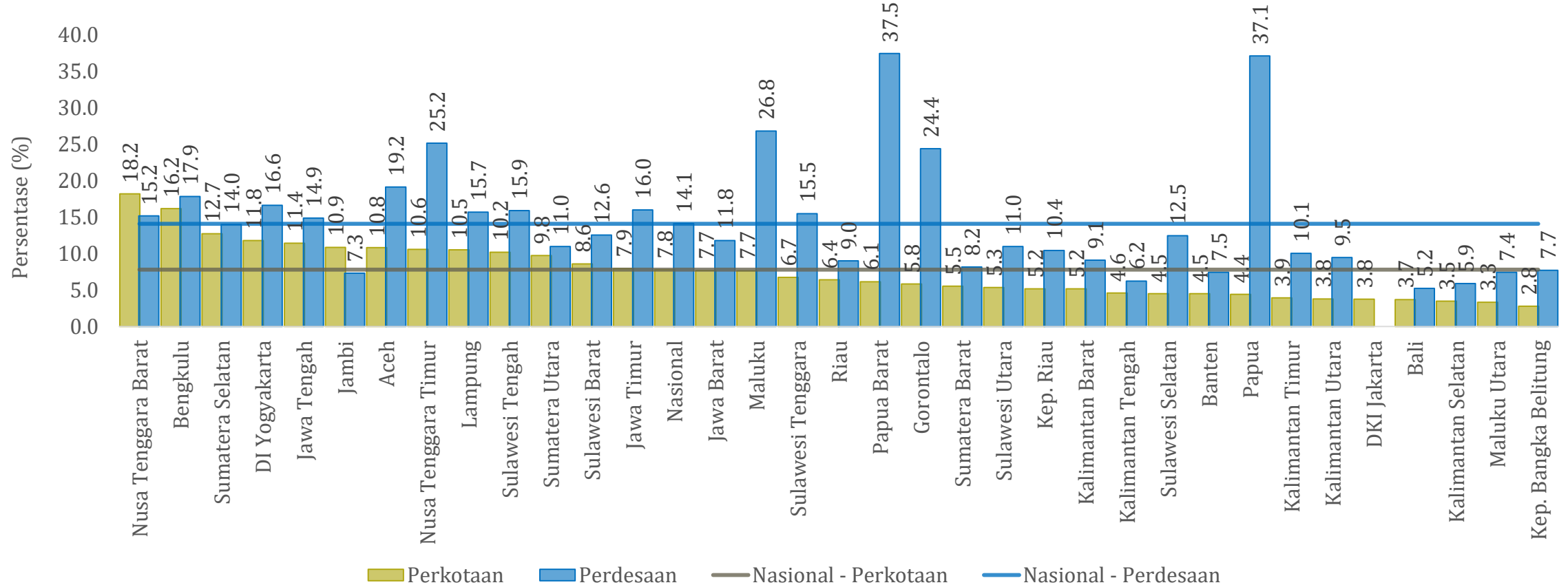


Sumber: BPS, diolah.

# Persebaran Kemiskinan

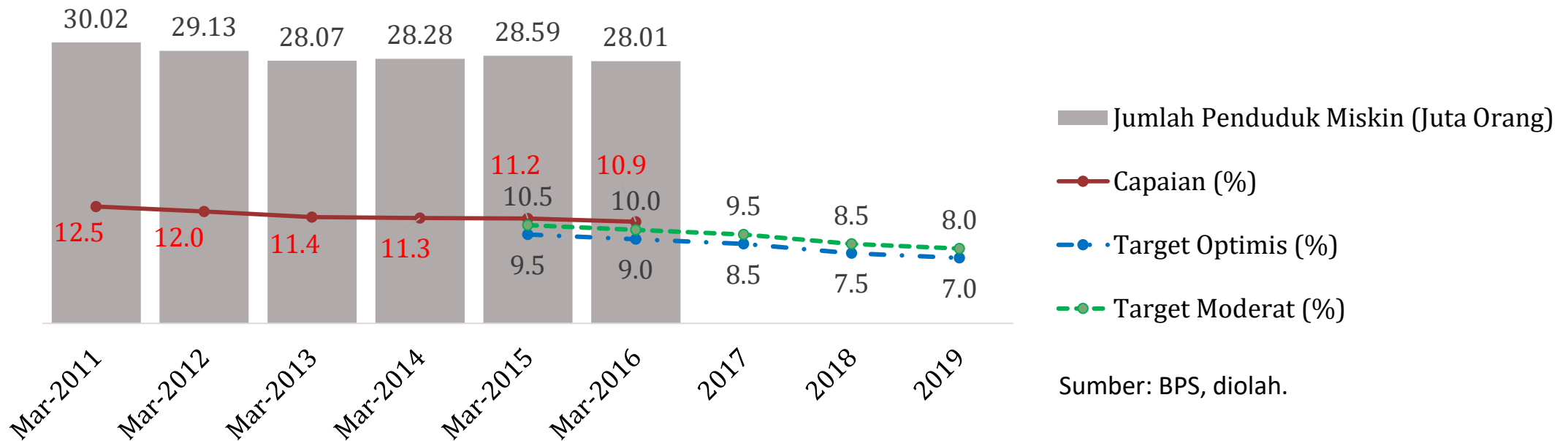
- Terdapat disparitas antara tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia, Maret 2016



# Target Penurunan Kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019

Target dan Capaian Tingkat Kemiskinan, 2011-2019



- Hingga 2016, capaian tingkat kemiskinan belum berjalan sesuai dengan target.
- Dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang  $\pm 500$  ribu per tahunnya. Diperlukan penurunan penduduk miskin sebesar  $\pm 2$  juta jiwa per tahun guna mencapai target RPJMN 2015-2019.

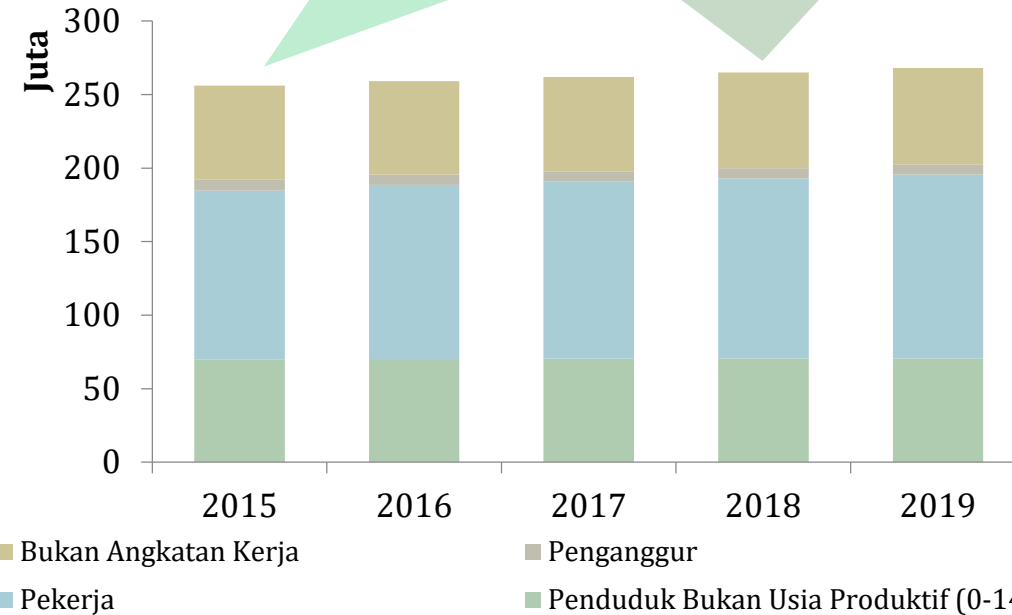
# Target Pembangunan Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018

TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin sekitar 28,0 juta jiwa  
(Sumber: BPS, Maret 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa



TAHUN 2018



Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta



Angkatan Kerja: 129,4 juta



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

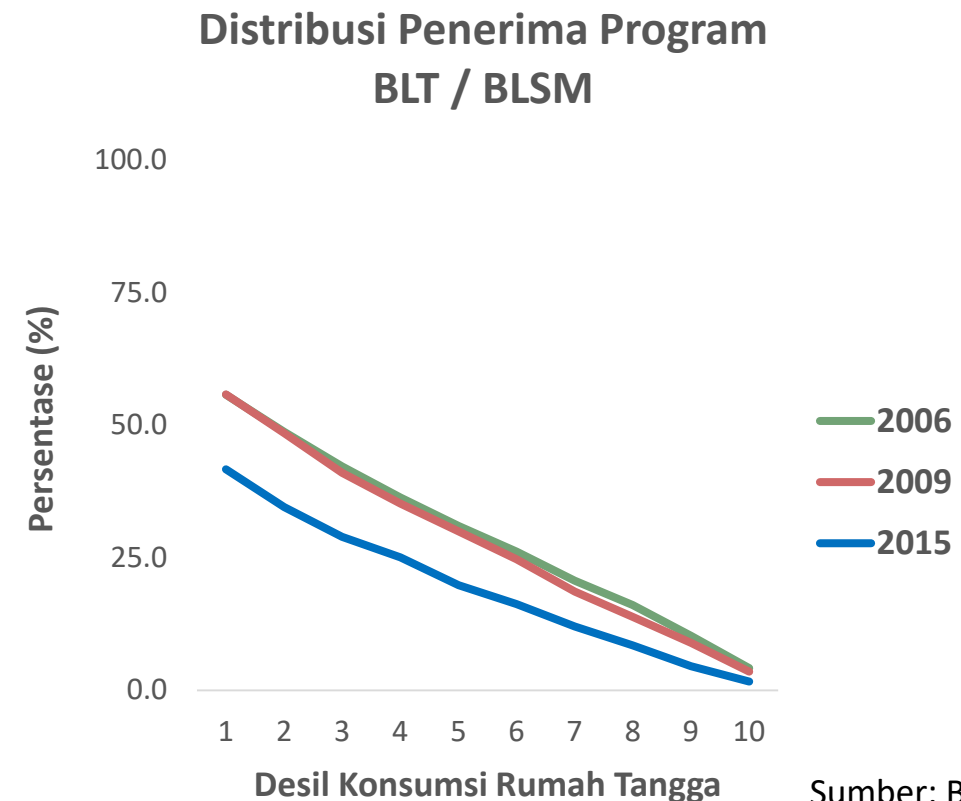
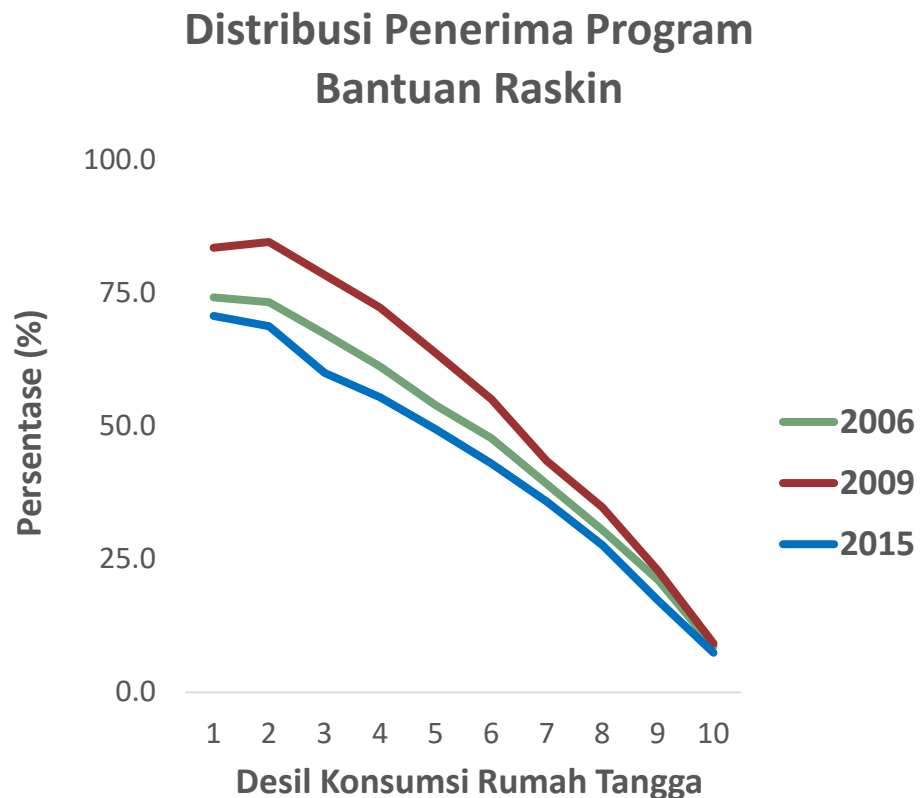
## TARGET PEMBANGUNAN 2018

- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
- Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
- Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

# Tantangan dalam Penurunan Kemiskinan – Efektivitas Penetapan Sasaran

- Masih terdapat rumah tangga di 40% terendah yang tidak menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin).

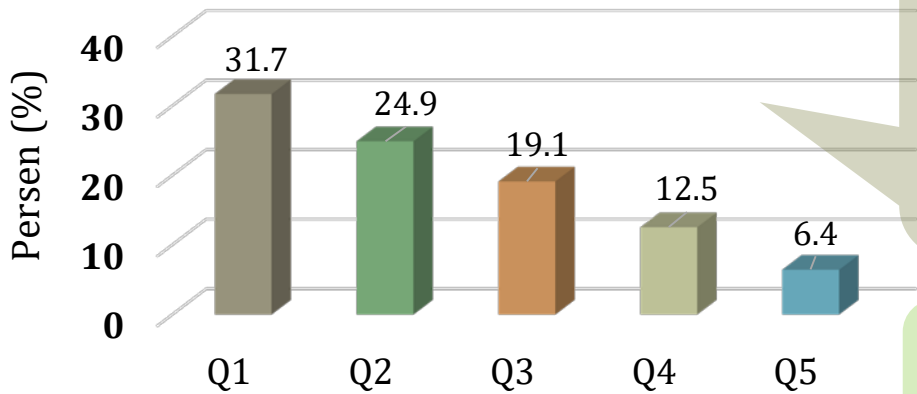


Sumber: BPS, diolah.



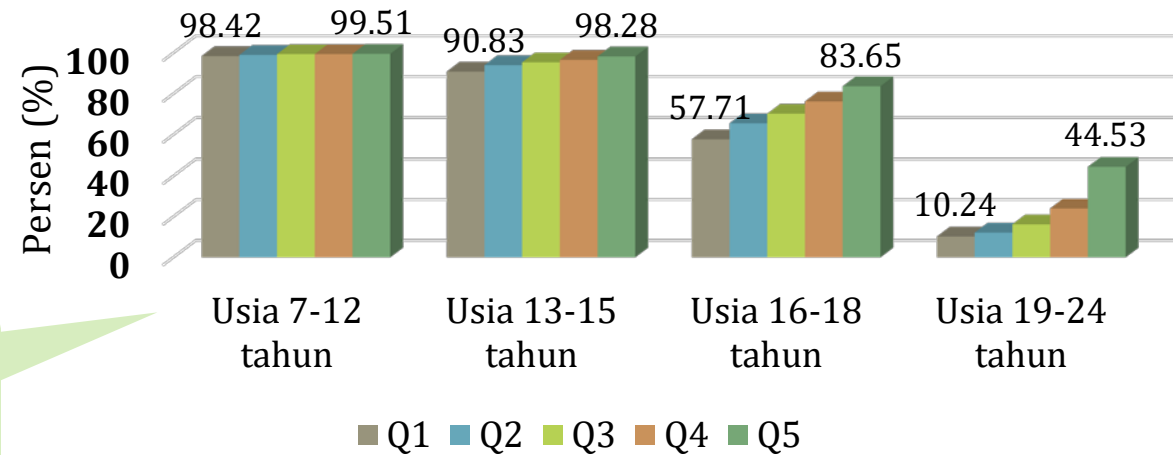
# Tantangan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

### Persentase Anak Tanpa Akte Kelahiran



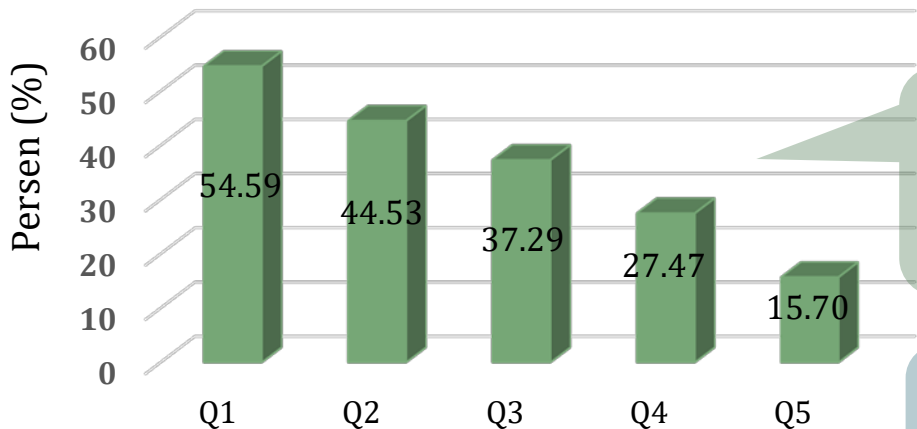
Terdapat 16,9 juta anak usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran, sebagian besarnya berasal dari keluarga berpendapatan terendah.

### Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Partisipasi sekolah penduduk miskin selalu lebih rendah pada setiap jenjang pendidikan.

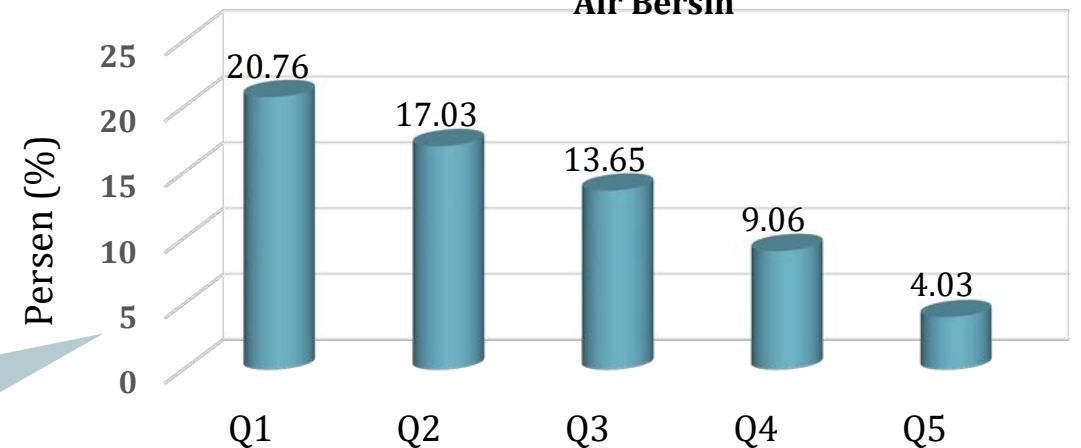
### Persentase Penduduk yang Tidak Mampu Mengakses Sanitasi



Masih terdapat lebih dari 50 persen penduduk termiskin yang tidak memiliki akses sanitasi.

Penduduk miskin (40% terbawah) masih sulit mengakses air bersih.

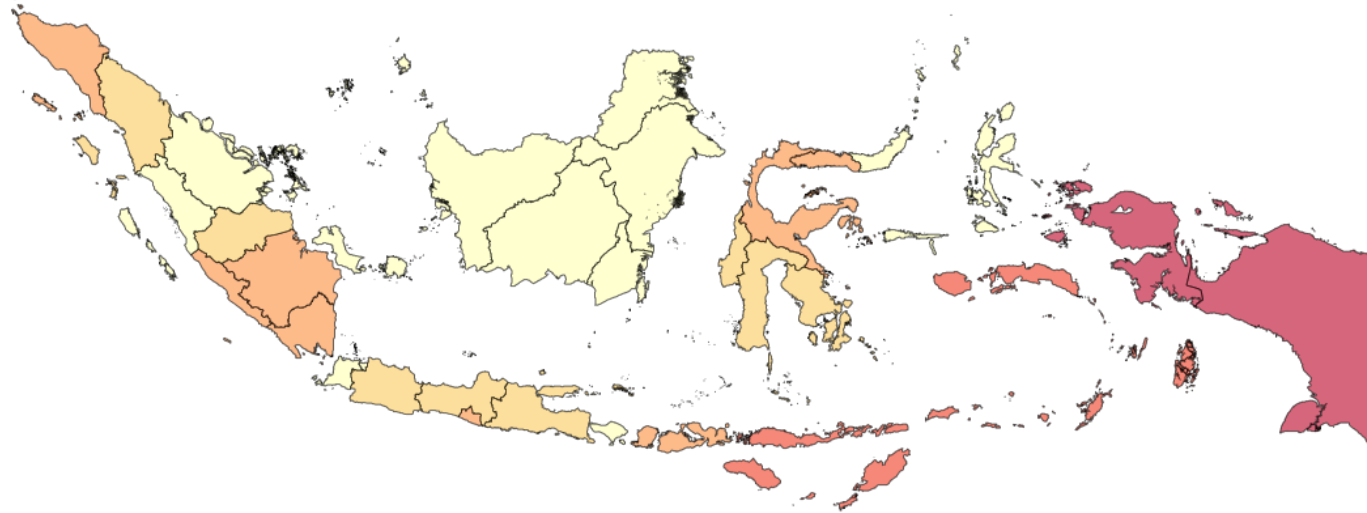
### Persentase Penduduk yang Tidak Mampu Mengakses Air Bersih



Keterangan: Q1 = 20% penduduk dengan pendapatan terbawah  
 Q2 = 20% penduduk menengah bawah  
 Q3 = 20% penduduk menengah  
 Q4 = 20% penduduk menengah atas  
 Q5 = 20% penduduk dengan pendapatan teratas

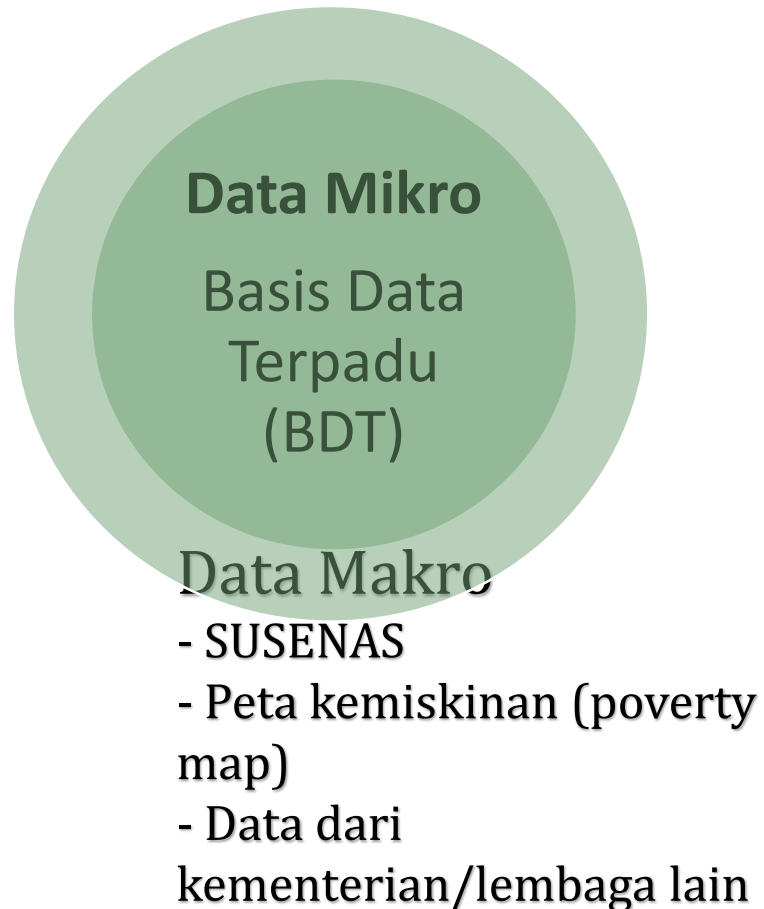
Sumber: Susenas Maret 2015, diolah Bappenas

# Tantangan dalam Efektivitas Penetapan Sasaran



- Penetapan sasaran di Indonesia sangat kompleks karena terdiri dari  $\pm$  250 juta penduduk, 17.521 pulau, 514 kabupaten/kota, tingkat migrasi yang tinggi, kemiskinan bersifat dinamis, dan adanya keterbatasan pemerintah dalam hal anggaran.
- Diperlukan kombinasi beragam jenis data yang dapat mengakomodasi permasalahan dalam efektivitas penetapan sasaran.

# Kerjasama dalam Penyediaan Data



## Data Mikro

- Data penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah.
- Didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin.
- Menggunakan pendekatan sensus sehingga identifikasi dapat sampai pada identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya.

## Data Makro

- Mengestimasi angka kemiskinan yaitu proporsi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk.
- Konsep basic needs approach.
- Menggunakan rancangan sampling sehingga dengan jumlah sampel yang efisien dapat diperoleh estimasi kemiskinan di suatu wilayah.

# Perbedaan Metode Penetapan Sasaran – Data Makro dan Mikro

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Data Mikro: i.e. Proxy mean tests (PMT)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tingkat akurasi relatif tinggi</li><li>▪ Biaya relatif murah</li><li>▪ Lebih mudah diverifikasi dan sulit dimanipulasi</li><li>▪ Dapat direplikasi secara konsisten dan kriteria yang jelas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tidak memberikan fleksibilitas dalam menilai rumah tangga</li><li>▪ Memiliki built-in statistical error</li><li>▪ Memerlukan kapasitas administratif yang tinggi</li></ul>
Data Makro: i.e. Penargetan Geografis	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mudah secara administratif</li><li>▪ Dapat populer secara politis</li><li>▪ Mudah dikombinasikan dengan metode lain</li><li>▪ Memastikan pagu terdistribusi secara adil antardaerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memerlukan data sosial ekonomi nasional yang baik</li><li>▪ Kurang akurat di tingkat lokal</li><li>▪ Seringkali perlu dikombinasikan dengan metode lain</li></ul>

- Kelemahan tiap jenis data kemiskinan dapat ditopang dengan kelebihan yang disediakan oleh jenis data kemiskinan lain (komplementer).

# Pentingnya Kerjasama dalam Penyediaan Data yang Akurat

---

“Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betul benar, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detil.”

- Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Sensus Ekonomi 2016.

- Program penanggulangan kemiskinan atau bantuan sosial oleh berbagai pihak yang berkepentingan memerlukan pendataan kemiskinan yang akurat.
- Kendala dalam program penanggulangan kemiskinan yakni sulitnya mengidentifikasi lokasi di mana orang miskin paling banyak ditemukan sudah dapat diatasi melalui adanya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).
- Tidak kalah pentingnya adalah perlunya alat penargetan geografis yang menjangkau wilayah terkecil dan mudah diakses oleh publik.

# Peta Kemiskinan – Definisi dan Manfaat

- Gambaran lokasi geografis mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkat wilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu.
- Profil kemiskinan di dalam peta juga dapat dipadukan dengan data ketimpangan, infrastruktur, serta indikator sosial ekonomi lainnya.

## Peran dan Manfaat

Mengetahui “kantong” penduduk miskin dan keragaman tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah hingga tingkat administratif terkecil.

Mengkomunikasikan informasi secara terbuka mengenai distribusi kesejahteraan sosial kepada para stakeholders (pemerintah, masyarakat sipil, lembaga donor, dan sektor swasta).

Sebagai baseline/basis data untuk evaluasi dampak program dan kebijakan.

Memperbaiki penargetan dan penggunaan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.

Meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengambilan keputusan oleh pemerintah melalui akses data kemiskinan yang terbuka.

# Kesimpulan

---

- Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
- Data kemiskinan yang dapat dipercaya diperlukan untuk menggambarkan keadaan di lapangan, meyakinkan para pengambil kebijakan, serta mengidentifikasi kebutuhan strategi perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan.
- Pemutakhiran data kemiskinan geografis secara berkala dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan sasaran serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- Dibutuhkan semangat kerja sama antarlembaga/antarkementerian dalam berbagi kemudahan akses demi menyukseskan program keterbukaan data.